

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat. BMT Halaqoh hadir menyediakan pembiayaan Qardh dengan persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan di lelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Namun BMT tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut tidak cukup atau kurang. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan fatwa dsn mui terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad *qardh* di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Untuk metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis normatif empiris yaitu dengan analisis fatwa DSN MUI.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad qardh di KSPPS BMT Halaqoh Kabupaten Ngawi menurut fatwa tidak sesuai dengan ketentuan karena setelah proses pelelangan selesai KSPPS BMT Halaqoh tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut kurang atau tidak mencukupi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan adanya fatwa di atas yang mana seharusnya dari pihak KSPPS BMT Halaqoh ini perlu mengkonfirmasi adanya proses setelah jaminan dilelang dan apabila uang hasil lelang belum mencukupi maka pihak BMT mengkonfirmasi kekurangan dan dari pihak nasabah tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut secara penuh.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Fatwa DSN MUI

ABSTRACT

Sharia Microfinance Institutions are a model for providing financial services to the public. BMT Halaqoh is here to provide Qardh financing with initial requirements in the form of a BPKB guarantee. If there are customers who cannot pay off, the collateral will be auctioned to pay off the debt borrowed. However, BMT did not confirm that the guarantee was insufficient or insufficient. The purpose of this study is to find out how the fiqh muamalah and fatwa dsn mui reviews on financing problems with qardh contracts at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.

This study uses qualitative research with the type of field research (field research). Sources of data in the form of primary, secondary and tertiary data. For data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. In the empirical normative analysis technique, namely the analysis of the fatwa DSN MUI.

The results of this study concluded that the qardh contract at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi Regency according to the fatwa was not in accordance with the provisions because after the auction process was completed KSPPS BMT Halaqoh did not confirm that the guarantee was insufficient or insufficient. This is certainly not in accordance with the fatwa above which should be from the KSPPS BMT Halaqoh need to confirm the existence of a process after the guarantee is auctioned and if the money from the auction is not sufficient then the BMT confirms the shortage and the customer is still obliged to fulfill the deficiency in full.

Keywords: Problem Financing, Fatwa DSN MUI